SKRIPSI

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) IMPIAN BERSAMA KAMPUNG PULAU KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Oleh:

GITA SYAH BANI
175310353

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kesesuaian pengendalian internal atas pemberian kredit yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Impian Bersama Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Metode penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara sebagai data primer, serta didukung oleh data sekunder. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian internal atas pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Impian Bersama Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu belum sesuai dengan sistem pengendalian intern yang efektif. Hal ini disebabkan karena; 1) Struktur organisasi yang ada belum memisahkan tanggung jawab fungsional setiap jabatan secara tegas, tugas dan tanggungjawab yang dijabarkan cenderung terlalu ringkas dan kurang rinci membahas tugas masing-masing pengurus. 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan belum memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya karena tidak adanya tanda tangan pada lembar surat kuasa. 3) Praktik yang kurang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, masih mengandalkan SOP lama yang terbukti memiliki celah pelanggaran, belum menyusun strategi penilaian risiko yang baru, dan tidak adanya verifikasi status usaha oleh karyawan staf analisis kredit. 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya belum efektif, karena tidak satupun pengurus Bumdes Impian Bersama yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

Kata kunci : Pengendalian Intern, Pemberian Kredit

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze and determine the appropriateness of internal control on credit at Village Private Business Agency (Bumdes) Impian Bersama Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Research method was qualitative research. Data collection technique using interview and documentation. Data source in this research comes from interview result as primary data also supported by secondary data. Sources of data in this study come from interviews as primary data, and are supported by secondary data. Data were analyzed by qualitative descriptive analysis.

Based on the results of the research, it is known that the internal control system for providing credit at Village Private Business Agency (Bumdes) Impian Bersama is not in accordance with an effective internal control system. This is caused by; 1) The existing organizational structure has not clearly separated the functional responsibilities of each position, the tasks and responsibilities that are outlined tend to be too concise and lack detail to discuss the duties of each manager. 2) The system of authority and recording procedures has not provided sufficient protection for wealth, debt, income and expenses because there is no signature on the power of attorney. 3) Unhealthy practices in carrying out the duties and functions of each organizational unit, still relying on old SOPs that are proven to have breaches, have not developed a new risk assessment strategy, and there is no verification of business status by credit analysis staff employees. 4) Employees whose quality is in accordance with their responsibilities have not been effective, because none of the Bumdes Impian Bersama employee has a background in accounting education.

Keywords: Internal Control, Credits

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul **"Analisis pengendalian internal pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Impian Bersama Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu"**. Adapun penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan kali ini ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Firdaus Ar, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Ibu Yusrawati, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukan, namun selalu memberikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masukan, dorongan dan saran demi memberikan konsep penelitian, sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA, Bapak Muhammad Fahdi, SE., M.Ak selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran, arahan dan perbaikan agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
6. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau atas segala ilmu yang diberikan selama kegiatan perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah membantu mengurus dokumen akademik.
8. Seluruh pengurus Bumdes Impian Bersama Kampung Pulau yang telah memberikan bantuan dan izin dalam pengumpulan data.
9. Teristimewa untuk orangtua beserta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan nasehat, semangat, dukungan dan dorongan baik moril maupun materil sehingga penulis terus termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2017/2018 atas segala persahabatan, bantuan dan kerjasamanya selama ini.
11. Semua pihak-pihak yang telah membantu sehingga dapat terselesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan mengingat kemampuan penulis yang terbatas dan jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar menjadi bahan koreksi yang ilmiah, sehingga skripsi ini kelak menjadi lebih baik dalam menambah wawasan bagi seluruh pihak.

Wassalamualaikum, Wr. Wb…

Pekanbaru, 18 Agustus 2021
Penulis,

GITA SYAH BANI
175310353

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....
HALAMAN JUDUL .....
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....
TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI .....
NOTULENSI SEMINAR PROPOSAL .....
NOTULENSI SEMINAR HASIL .....
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....
BERITA ACARA MEJA HIJAU .....
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI .....
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN .....
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL .....
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI .....
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME .....
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....
ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
BAB I. PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 8
1.3. Tujuan Penelitian 8
1.4. Manfaat Penelitian 8
1.5. Sistematika Penulisan 9

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II. TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 11
2.1. Telaah Pustaka 11
2.1.1. Pengertian Pengendalian Intern 11
2.1.2. Tujuan Pengendalian Intern 13
2.1.3. Unsur Pengendalian Intern 14
2.1.4. Prinsip-Prinsip Pengendalian Intern 15
2.1.5. Keterbatasan Struktur Pengendalian Intern 16
2.1.6. Pemberian Kredit 18
2.1.7. Penelitian Terdahulu 20
2.1.8. Kerangka Pemikiran 22
2.2. Hipotesis 22
BAB III. METODE PENELITIAN 24
3.1. Desain Penelitian 24
3.2. Objek Penelitian 24
3.3. Definisi Variabel Penelitian 24
3.4. Jenis dan Sumber Data 25
3.5. Teknik Pengumpulan Data 25
3.6. Teknik Analisis Data 26
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 27
4.1. Gambaran Umum Bumdes Impian Bersama 27
4.1.1. Sejarah Singkat Bumdes Impian Bersama 27
4.1.2. Struktur Organisasi Bumdes Impian Bersama 28
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan di Bumdes Impian Bersama 30
4.2. Prosedur Kredit Bumdes Impian Bersama 35
4.3. Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Impian Bersama Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu 39
4.3.1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas 39

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4.3.2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya 41
4.3.3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi 43
4.3.4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya 45
4.4. Penyelesaian Kredit Bermasalah 47
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 51
5.1. Simpulan 51
5.2. Saran 52
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Statistik Tunggakan Unit Ekonomi Desa (UED) Bumdes Impian Bersama Selama Tahun 2017 s/d 2019 6

Tabel 1.2. Jumlah Nasabah Unit Ekonomi Desa (UED) Bumdes Impian Bersama Selama Tahun 2017 s/d 2019 7

Tabel 4.1. Kredit Bermasalah Pada Unit Ekonomi Desa (UED) Bumdes Impian Bersama Selama Tahun 2017 s/d 2019 48

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Bumdes Impian Bersama Kampung Pulau 29

Gambar 4.2. Flow Chart Pemberian Kredit Bumdes Impian Bersama Kampung Pulau 36

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. SOP Pemberian Kredit Bumdes Desa Kampung Pulau

Lampiran II. Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K)

Lampiran III. Data Jumlah Simpan Pinjam Tahun 2017, 2018, dan 2019

Lampiran IV. Data Laporan Perkembangan Pinjaman Tahun 2017, 2018, dan 2019

Lampiran V. Laporan Laba Rugi Tahun 2017, 2018, dan 2019

Lampiran VI. Laporan Neraca Simpan Pinjam Tahun 2017, 2018, dan 2019

Lampiran VII. Tupoksi Pengurus Bumdes Kampung Pulau

Lampiran VIII. Struktur Organisasi Bumdes Kampung Pulau

Lampiran IX. Dokumentasi Bumdes Impian Bersama Kampung Pulau

Lampiran X. Landasan Hukum Bumdes Kampung Pulau

Lampiran XI. Proposal Pengajuan Kredit

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

BUMDes adalah lembaga usaha Desa yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa, sesuai dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 213 dinyatakan bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Salah satu unit usaha yang dijalankan BUMDes adalah menyalurkan pinjaman usaha kecil untuk membantu anggota dan masyarakat yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya, dan pinjaman ini membuat anggota atau masyarakat merasa terbantu. Rencana kredit memberikan pinjaman modal setahun sekali. Pinjaman usaha kecil yang diberikan BUMDes tidak terlepas dari tunggakan nasabah yang dicicil. Hal ini disebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi pokok pinjaman dan bunga yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian kredit.

Dalam penyaluran kredit diperlukan adanya pengendalian intern agar terhindar dari segala bentuk risiko dan penyelewengan yang mungkin terjadi. Sistem pengendalian intern tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administratif. Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Suyatno dkk (2007:18) pengendalian internal kredit merupakan usaha menjaga kredit agar tetap lancar, produktif dan tidak macet. Pengendalian intern dilaksanakan melalui prosdur pemberian kredit dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit disebut "5C", yaitu:

1) *Character* atau karakter yaitu suatu prinsip yang menekankan bahwa calon nasabah harus kredibel, bertanggungjawab, serta reputasi yang baik.
2) *Capacity,* atau kapasitas yaitu prinsip yang memandang calon nasabah berdasarkan bidang bisnis yang ditekuni, pendidikan, serta kepatuhan atas aturan pemerintah.
3) *Capital,* atau modal yaitu prinsip yang menilai efektivitas pemberian modal apakah efektif yang diukur dari segi kondisi ekonomi saat ini.
4) *Collecteral,* atau jaminan yaitu prinsip yang menilai keabsahan agunan yang dimiliki sesuai dengan nominal pinjaman.
5) *Condition,* atau kondisi yaitu prinsip yang kondisi ekonomi serta disesuaikan dengan prospek usaha dari calon nasabah tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Hery (2013:11) pengendalian internal mutlak diperlukan seiring dengan tumbuh dan meningkatnya transaksi bisnis perusahaan atau organisasi. Pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional dan finansial perusahaan telah berjalan sesuai prosedur dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen organisasi.

Menurut Wakhyudi (2018:13) pengendalian internal dapat memastikan suatu perusahaan atau organisasi memiliki jaminan keamanan aset yang dimiliki oleh organisasi, informasi akuntansi organisasi yang akurat dan kredibel, serta karyawan yang mentaati peraturan dan hukum.

Berdasarkan penelitian Nilawati (2016) menemukan permasalahan pengendalian internal di Bumdes Artha Werdhi Sarana Desa Pengastulan adalah kualitas SDM yang kurang memadai, dan adanya rangkap tugas yang tidak sesuai dengan struktur organisasi. Penelitian Pirdaus (2016) menambahkan permasalahan pengendalian internal di Bumdes Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat adalah tidak adanya seleksi calon nasabah untuk memastikan kredit yang disalurkan tepat sasaran, dapat diawasi dan dikendalikan oleh pihak Bumdes sehingga dapat menurunkan risiko kredit macet. Penelitian Lestari, Tripalupi dan Haris (2018) menyebutkan bahwa pada Bumdes Karya Sari di Desa Pakisan ditemui permasalahan pengendalian internal yaitu dalam praktik pemberian kredit tidak mensyaratkan jaminan atau agunan dalam pemberian kredit. Calon debitur hanya perlu melengkapi administrasi dan menyetujui surat perjanjian kredit sehingga Bumdes ini sangat riskan terhadap adanya risiko kredit macet.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Impian Bersama bertujuan membantu dan melayani kebutuhan masyarakat Desa Kampung Pulau dari aspek keuangan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bumdes Impian Bersama, pada pasal 5 tentang prosedur peminjaman menyebutkan bahwa produk dana usaha ekonomi mikro (UEM) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 diperuntukkan bagi masyarakat dengan jenis usaha sebagai berikut Perdagangan (D), Pertanian (T), Perkebunan (K), Perikanan (I), Peternakan (Tr), Industri kecil (Ik), dan Jasa (J). Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bumdes Impian Bersama, maka dapat diketahui :

Tahap pertama, persyaratan peminjam adalah warga masyarakat Desa Kampung Pulau yang telah berdomisili minimal 5 tahun di Desa Kampung Pulau yang mempunyai usaha lebih dari 5 tahun. Pinjaman dapat diajukan secara perseorangan maupun kelompok. Usia anggota yang boleh mengajukan minimal 20 tahun dan maksimal 60 tahun.

Tahap kedua, calon peminjam melampirkan fotokopi KTP atau SIM, membayar biaya administrasi sebesar 0,7s% dari jumlah pinjaman dan mempunyai tabungan minimal 5% dari jumlah pinjaman. Bagi peminjam lanjutan memiliki ketentuan khusus tergantung dari sisa angsuran dan *track record* pembayarannya.

Tahap ketiga, calon peminjam membuat proposal sesuai dengan contoh format yang telah disesuaikan. Menyiapkan agunan/ jaminan harta untuk pinjaman lebih dari Rp.1.000.000,- dan jika jumlah pinjaman kurang dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Rp.1.000.000,- maka diharuskan perkelompok dengan membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Tanggung Renteng yang dibuat diatas kertas bermaterai dengan menyebutkan sumber dana yang akan digunakan.

Tahap keempat, calon peminjam harus dinilai layak oleh staff analisis kredit baik secara administrasi dan usaha serta bersedia melayani staff analisis kredit untuk menilai kelayakan usaha.

Tahap kelima, calon peminjam menyerahkan agunan yang menjadi tanggungjawab pengelola unit Bumdes SP. Agunan dapat berbentuk barang bergerak yang diterima adalah Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Agunan haruslah dokumen asli dan keabsahannya tidak diragukan.

Tahap keenam, Staff Analisis Kredit akan memverifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara melalui musyawarah khusus dan untuk disetujui didanai kegiatan yang diusulkan oleh anggota Unit Bumdes tersebut. Besarnya nilai pinjaman barang bergerak maksimal 70% dari nilai agunan dan pinjaman barang tidak bergerak maksimal 80% dari nilai agunan yang dihitung pada akhir peminjam jatuh tempo. Adapun besar bunga pinjaman yaitu 1,5% per bulan flat.

Peminjam wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan isi Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) dengan memperhatikan jenis dan siklus usaha. Jangka waktu angsuran pengembalian pinjaman dilakukan periodik yaitu bulanan dan musiman dengan jangka waktu 12 bulan dan maksimal 18 bulan. Jadwal pembayaran angsuran ditambah bunga yang diterima pengelola adalah dimulai pada tanggal 1 sampai tanggal 15 setiap bulannya, setelah tanggal tersebut dinyatakan menunggak dan dikenakan denda sesuai hasil musyawarah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tahap ketujuh, calon peminjam menunggu hasil musyawarah desa tentang perguliran dana untuk periode tertentu. Setiap perguliran baru dilakukan setelah Dana Usaha Desa terserap semua dan pada saat dana awal tidak mencukupi lagi terhadap besarnya jumlah usulan pinjaman masyarakat. Peminjaman reguler menganut sistem waiting list atau antrian. Peminjam *urgent* atau *exceptional* tidak menganut sistem antrian dengan syarat harus melampirkan data-data pendukung pinjaman dan harus diketahui kepala desa. Bagi peminjam yang akan melunasi hutangnya sebelum selesai batas waktu kredit/ angsurannya maka wajib melunasi sisa hutang (pokok ditambah jasa) dan bisa mengajukan pinjaman berikutnya.

Jenis kredit mulai dari Perdagangan (D), Pertanian (T), Perkebunan (K), Perikanan (I), Peternakan (Tr), Industri kecil (Ik), Jasa (J) pada dasarnya memiliki bunga yang sama yaitu 1,5% flat perbulan dari total pinjaman. Di bawah ini adalah tabel jumlah tunggakan kredit Unit Ekonomi Desa (UED) pada Bumdes Impian Bersama Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu:

Tabel 1.1
Statistik Tunggakan Unit Ekonomi Desa (UED) Bumdes Impian Bersama Selama Tahun 2017 s/d 2019

Kolektibilitas	Tahun 2017	%	Tahun 2018	%	Tahun 2019	%
Lancar	Rp.449.156.000	78%	Rp.405.673.000	70%	Rp.436.708.000	72%
Dalam perhatian khusus	Rp.52.697.000	9%	Rp.62.293.000	11%	Rp.68.041.000	11%
Kurang lancar	Rp.8.272.000	1%	Rp.40.072.000	7%	Rp.18.496.000	3%
Diragukan	Rp.12.456.000	2%	Rp.11.200.000	2%	Rp.10.305.000	2%
Macet	Rp.54.525.000	9%	Rp.57.053.000	10%	Rp.69.830.000	12%
Total	Rp.577.106.000	100%	Rp.576.291.000	100%	Rp.603.380.000	100%

Sumber: Bumdes Impian Bersama, (data diolah)

Dari tabel di atas memperlihatkan kolektibilitas Bumdes Impian Bersama kredit dalam perhatian khusus tahun 2017 sebesar Rp.52.697.000 (9%) meningkat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

di tahun 2018 hingga 2019 menjadi Rp.68.041.000 (11%). Kredit kurang lancar dari tahun 2017 sebesar Rp.8.272.000 (1%) meningkat ditahun 2018 menjadi Rp.40.072.000 (7%) namun kembali menurun di tahun 2019 menjadi Rp.18.496.000 (3%). Kredit diragukan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Kredit macet dari tahun 2017 sebesar Rp.54.525.000 (9%), meningkat di tahun 2018 menjadi Rp.57.053.000 (10%) dan kembali meningkat di tahun 2019 menjadi Rp.69.830.000 (12%). Jumlah peminjam tahun 2017 s/d 2019 yaitu:

Tabel 1.2
Jumlah Nasabah Unit Ekonomi Desa (UED) Bumdes Impian Bersama Selama Tahun 2017 s/d 2019

Tahun	Jenis Usaha	Jumlah (orang)	Nilai pemberian kredit (Rp)	Persentase (%)
2017	Perdagangan (D)	285	Rp. 1.518.000.000,-	31,23%
	Pertanian (T)	6	Rp. 26.000.000,-	0,53%
	Perkebunan (K)	31	Rp. 182.000.000,-	3,74%
	Perikanan (I)	44	Rp. 161.000.000,-	3,31%
	Peternakan (Tr)	1	Rp. 10.000.000,-	0,21%
	Industri kecil (Ik)	17	Rp. 98.000.000,-	2,02%
	Jasa (J)	496	Rp. 2.865.500.000,-	58,95%
	Total	880	Rp. 4.860.500.000,-	100%
2018	Perdagangan (D)	297	Rp. 1.616.000.000,-	29,21%
	Pertanian (T)	6	Rp. 26.000.000,-	0,47%
	Perkebunan (K)	31	Rp. 182.000.000,-	3,29%
	Perikanan (I)	44	Rp. 161.000.000,-	2,91%
	Peternakan (Tr)	10	Rp. 91.000.000,-	1,64%
	Industri kecil (Ik)	9	Rp. 37.000.000,-	0,67%
	Jasa (J)	439	Rp. 3.419.500.000,-	61,81%
	Total	836	Rp. 5.532.500.000,-	100%
2019	Perdagangan (D)	304	Rp. 1.675.000.000,-	27,03%
	Pertanian (T)	6	Rp. 26.000.000,-	0,42%
	Perkebunan (K)	31	Rp. 182.000.000,-	2,94%
	Perikanan (I)	45	Rp. 164.000.000,-	2,65%
	Peternakan (Tr)	10	Rp. 91.000.000,-	1,47%
	Industri kecil (Ik)	9	Rp. 37.000.000,-	0,60%
	Jasa (J)	460	Rp. 4.022.500.000,-	64,91%
	Total	865	Rp. 6.197.500.000,-	100%

Sumber: Bumdes Impian Bersama, (data diolah)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari tabel di atas memperlihatkan jumlah nasabah Bumdes Impian Bersama selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2017 terdapat 880 orang nasabah dengan besar total pembiayaan mencapai Rp. 4.860.500.000. Pada tahun 2018 terdapat penurunan jumlah nasabah menjadi 836 orang namun dengan total pembiayaan meningkat sebesar Rp. 5.532.500.000. Pada tahun 2019 terdapat peningkatan jumlah nasabah menjadi 865 orang dengan total peningkatan pembiayaan sebesar Rp. 6.197.500.000,-. Ditinjau dari jenis usaha pembiayaan, maka dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir jenis pinjaman untuk Perdagangan (D) dan Jasa (J) memiliki jumlah nasabah terbesar dibandingkan jenis usaha UED lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul "**Analisis pengendalian internal pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Impian Bersama Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah pengendalian internal atas pemberian kredit yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Impian Bersama Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu selama tahun 2017-2019 telah diterapkan secara efektif.

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kesesuaian pengendalian internal atas pemberian kredit yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Impian Bersama Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang bisa diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan permasalahan akuntansi terkait dengan pengendalian internal atas pemberian kredit khususnya pada badan usaha milik desa (BUMDes).
2) Sebagai bahan masukan dan kontribusi untuk Bumdes Impian Bersama Kampung Pulau dalam mempertimbangkan dan menetapkan pengendalian inter terkait kebijakan terkait atas pemberian kredit.
3) Sebagai tambahan wawasan bagi peneliti berikutnya yang mengangkat topik penelitian sejenis khususnya pada Badan Usaha Milik Desa dalam Unit Simpan Pinjam.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian yang setiap bagiannya berisikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang digunakan setiap bab.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini membahas tentang landasan-landasan teoritis menurut para ahli yang relevan disertai dengan perumusan hipotesis penelitian yang diajukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini penulis menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan secara singkat terkait gambaran umum Bumdes Impian Bersama, selanjutnya juga memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengendalian internal pemberian kredit.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terdiri atas kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan didasarkan atas kelemahan yang ada sehingga diharapkan dapat berguna bagi Bumdes.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Telaah Pustaka

2.1.1. Pengertian Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2013:164), pengendalian internal mencakup struktur organisasi, metode, dan tindakan untuk memelihara kekayaan organisasi, memeriksa keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Menurut Krismiaji (2010:218), Pengendalian internal adalah rencana dan metode organisasi yang digunakan untuk memelihara atau melindungi aset dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan.

Menurut Susanto (2013:95) pengendalian internal merupakan proses yang dipengaruhi oleh direksi, manajemen dan karyawan yang bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara meyakinkan melalui metode-metode berikut: efisiensi dan efektivitas operasional, representasi laporan keuangan yang andal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipakai bertujuan menjaga asset, menyalurkan informasi yang rinci, tepat, dan reliabel serta operasional organisasi, dan mendorong kepatuhan terhadap strategi yang telah ditentukan sebelumnya (Romney dan Steinbart, 2015:229).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Sukrisno (2012:79) pengendalian internal adalah proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel entitas lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan yang memadai untuk mencapai tiga jenis tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Hery (2013:11) pengendalian internal adalah seperangkat peraturan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset atau aset lembaga perusahaan dari berbagai bentuk risiko penyalahgunaan, dan untuk memastikan bahwa informasi akuntansi perusahaan yang akurat disediakan. Selain itu, juga dapat memastikan bahwa semua undang-undang, peraturan, kebijakan, dan berbagai Kebijakan manajemen harus sesuai dengan peraturan atau pelaksanaan seluruh karyawan perusahaan.

Menurut Kumaat (2011:15) pengendalian internal adalah metode membimbing, memantau dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ini memainkan peran penting dalam mencegah dan mendeteksi penipuan dan melindungi sumber daya organisasi yang berwujud dan tidak berwujud (seperti hak kekayaan intelektual misalnya reputasi atau merk dagang).

Menurut Hall (2011:181), sistem pengendalian internal (*internal control system*) berkaitan dengan kebijakan, praktik dan prosedur yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan pemeliharaan aset perusahaan, memastikan keakuratan dan keandalan laporan, mendukung efisiensi kegiatan perusahaan, dan mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Bagian yang didirikan oleh manajemen perusahaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Widjadjanto (2011:4), pengendalian internal adalah suatu sistem yang ada dalam organisasi melalui penerapan berbagai metode dan metode atau tolok ukur lainnya, dan tujuannya adalah membuat kegiatan berdasarkan isi yang digariskan. Menurut Hartadi (2013:99), Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk melindungi aset, mendistribusikan informasi yang akurat, valid atau dapat diandalkan, mendorong dan meningkatkan efektivitas operasional dan kemampuan untuk mengelola strategi secara kondusif.

Menurut Munawir (2014:373) pengendalian internal adalah proses yang dilakukan oleh pemangku kepentingan seperti direksi, sumber daya, dan karyawan lainnya. Kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, dan memastikan bahwa perundang-undangan serta setiap landasan hukum harus dipatuhi direksi manajemen sebagaimana mestinya. Menurut Wakhyudi (2018:1) pengendalian internal adalah suatu metode yang memuat seperangkat aturan dan regulasi yang bertujuan untuk mengarahkan, mengawasi dan melindungi sumber daya perusahaan guna menghindari penyalahgunaan dan penipuan.

2.1.2. Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Hery (2013:60), tujuan pengendalian internal tidak lain adalah memberikan jaminan yang memadai bahwa:

1) Aset yang dimiliki perushaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu (perorangan) oknum karyawan tertentu. Dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

demikian, pengendalian intern diterapkan agar seluruh aset peruasahaan dapat terlindung dengan baik dari tindakan penyelewengan, pencurian, dan penyalahgunaan, yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan perusahaan;

2) Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil resiko baik atas salah sajilaporan yang disengaja (kecurangan) maupun tidak disengaja (kelalaian);

3) Karyawan telah menaati hukum dan peraturan. Pengendalian intern bagi perusahaan merupakan sebuah keharusan. Dengan adanya kewajiban audit laporan keuangan, direksi wajib menyerahkan pernyataan tentang kecukupan sistem pengendalian perusahaan serta model atau framework yang mana diadopsi.

2.1.3. Unsur Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2013:164), unsur pokok pengendalian internal dalam perusahaan adalah sebagai berikut :

1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.1.4. Prinsip-Prinsip Pengendalian Intern

Menurut Hartadi (2013:33) dalam pengendalian internal terdapat beberapa prinsip sebagai berikut:

1) Penetapan tanggung jawab secara jelas

   Untuk membangun pengendalian internal, manajemen harus dengan jelas mendefinisikan tanggung jawab, dan setiap orang harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya.

2) Penyelenggaraan pencatatan yang memadai

   Catatan terpercaya akan menjadi sumber informasi yang dapat digunakan manajemen untuk memantau operasi perusahaan. Untuk membangun pengendalian internal yang baik, perusahaan harus merancang formulir sesuai kebutuhan dan menggunakannya dengan benar.

3) Pengangsuransian kekayaan dan karyawan perusahaan

   Aset perusahaan harus memiliki pertanggungan asuransi yang memadai. Salah satu cara untuk melindungi karyawan adalah dengan membeli polis asuransi untuk kerugian akibat pencurian karyawan.

4) Pemisahan pencatatan dan penyimpanan aktiva

   Prinsip utama pengendalian internal mensyaratkan bahwa karyawan yang menyimpan atau bertanggung jawab atas aset tertentu tidak diperbolehkan untuk memelihara catatan akuntansi yang relevan, sehingga setiap karyawan tidak memikul tanggung jawab ganda, jika tidak maka dapat menyebabkan kekacauan manajemen catatan dan penyimpanan aset.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5) Pemisahan tanggung jawab atas transaksi yang berkaitan

Tanggung jawab atas transaksi terkait atau bagian dari transaksi terkait harus diserahkan kepada orang atau bagian dari perusahaan sehingga orang lain dapat memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.

6) Penggunaan peralatan mekanis (*optional*)

Perusahaan harus menggunakan peralatan mekanis sebanyak mungkin, seperti mesin kasir, pelindung cek, mesin waktu dan peralatan mekanis lainnya.

7) Pelaksanaan pemeriksaan secara independen

Jika ada karyawan pengganti atau karyawan yang kelelahan, prosedur yang ditetapkan dapat diabaikan atau diabaikan. Oleh karena itu, inspeksi rutin diperlukan untuk memastikan bahwa prosedur tersebut diikuti dengan benar. Selain pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa internal, perusahaan biasanya diperiksa oleh akuntan publik yang bertindak sebagai pemeriksa eksternal.

2.1.5. Keterbatasan Struktur Pengendalian Intern

Jusup (2014:254-255) memaparkan bahwa keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap sistem pengendalian intern sebagai berikut :

1) Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali, manajemen dan personel lain mungkin salah memahami keputusan bisnis atau melakukan tugas rutin karena kurangnya informasi, keterbatasan waktu atau tekanan lainnya.

2) Kemacetan. Karena petugas salah memahami instruksi, atau membuat kesalahan karena kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan, hal itu dapat menyebabkan kebingungan kendali. Transfer personel sementara atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

permanen, atau perubahan sistem atau program juga dapat menyebabkan kemacetan.

3) Kolusi. Tindakan kolektif beberapa orang untuk tujuan kriminal disebut konspirasi. Kolusi dapat menyebabkan kegagalan pengendalian internal yang ditetapkan untuk melindungi aset fisik, dan sistem desain internal tidak dapat mengungkapkan pelanggaran atau penipuan yang tidak terdeteksi.

4) Pelanggaran oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang dirumuskan untuk tujuan yang tidak sah, seperti keuntungan pribadi manajer, status keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan yang jelas.

5) Biaya dan manfaat. Biaya pengoperasian struktur pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal. Karena biasanya tidak mungkin untuk mengukur biaya dan manfaat secara akurat, manajemen harus membuat estimasi dan pertimbangan kuantitatif dan kualitatif ketika mengevaluasi biaya dan manfaat dari struktur pengendalian internal. Karena keterbatasan pengendalian internal, maka penerapan pengendalian internal tidak dirancang untuk menghilangkan segala kemungkinan kecurangan, sehingga perlu diketahui dan mengatasi kesalahan secepatnya. Meskipun desain dan implementasi pengendalian internal harus hati-hati, pengendalian internal tidak dapat dianggap efektif, bahkan jika karyawan sistem dapat merancang sistem yang ideal, efektivitasnya tergantung pada kemampuan dan ketergantungan orang yang menggunakannya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.1.6. Pemberian Kredit

Menurut Usman (2013:236) istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan hubungan ini bahwa kreditur (yang memberi kredit, umumnya bank) dengan perkreditan debitur (nasabah, penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit mengacu pada mata uang atau hak kreditur yang setara yang diberikan sesuai dengan perjanjian pinjaman atau kesepakatan antara bank dan pihak lain (mengharuskan peminjam untuk melunasi hutang dengan bunga setelah jangka waktu tertentu). Jika seseorang menggunakan jasa kredit, ia akan dikenakan bunga atas tagihan tersebut.

Menurut Suyatno dkk (2007:12) Kredit adalah kepercayaan individu atau badan usaha yang memberikan kredit (kreditur) dan yakin bahwa penerima kredit (debitur) akan dapat memenuhi semua janji di kemudian hari. Janji bisa dalam bentuk barang, uang atau jasa.

Menurut Usman (2013:238-240) kredit memiliki banyak jenis berdasarkan penggolongannya yaitu sebagai berikut:

a. Berdasarkan jangka waktu
    1) Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 tahun.
    2) Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara 1 sampai 3 tahun.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya di atas 3 tahun lebih.

b. Berdasarkan dokumentasi

1) Kredit dengan perjanjian tertulis
2) Kredit tanpa surat perjanjian tertulis misalnya kredit lisan (sangat jarang dilakukan), kredit dengan isntrumen berharga (promes, obligasi, kartu kredit)
3) Kredit cerukan (*overdraft*) akibat penarikan/ pembebanan giro yang melampaui saldonya, dan juga akibat penarikan/ pembebanan R/C yang melampaui plafonnya.

c. Berdasarkan bidang ekonomi

1) Kredit sektor pertanian, perburuhan dan sarana pertanian
2) Kredit sektor pertambangan
3) Kredit sektor perindustrian
4) Kredit sektor listrik, gas dan air
5) Kredit sektor konstruksi
6) Kredit sektor perdagangan, restoran, dan hotel
7) Kredit pengangkutan, perdagangan dan komunikasi
8) Kredit sektor jasa
9) Kredit sektor lain-lain

d. Berdasarkan tujuan

1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada debitur untuk keperluan konsumsi seperti kredit profesi, kredit perumahan (KPR) yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

digunakan pribadi, kredit kendaraan bermotor, pembelian alat-alat rumah tangga dan lain-lain.

2) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada debitur untuk meningkatkan nilai jualnya seperti kredit perumahan (KPR) yang disewakan, dan kredit modal usaha.

2.1.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian Pirdaus (2016) berjudul "Analisis sistem pengendalian intern pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bina usaha Desa Kepenuhan Barat" menemukan hasil yaitu proses persetujuan kredit mendominasi penanggungjawab untuk menentukan calon nasabah yang berhak mendapatkan pinjaman, menentukan batas kredit yang disetujui oleh BUMDes Bina Usaha berdasarkan jaminan calon nasabah, dan menggunakan sertifikat transaksi berupa tanda terima dan surat perjanjian kredit (SP2K) untuk menentukan pengawas proses penerbitan pinjaman. Tujuan pemilihan calon nasabah BUMDes adalah untuk memastikan alokasi pinjaman yang tepat sesuai dengan rencana.Dalam proses pemberian kredit, direksi turut serta memverifikasi integritas persyaratan pengajuan kredit dan melakukan analisis kredit dengan mengecek langsung lokasi usaha, agunan (agunan) dan kondisi proses calon nasabah.

Penelitian Nilawati (2016) berjudul "Analisis sistem pengendalian intern pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng" menemukan hasil yaitu (1) Sistem alokasi kredit yang diterapkan sudah tepat, dan elemen pengendalian internal pemberian kredit telah sepenuhnya dilaksanakan; (2) Permasalahannya adalah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sumber daya manusia yang kurang memadai dan adanya pegawai yang multi tasking; (3) Langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaiannya yaitu Sesuai dengan bidang profesi dan jenjang pendidikan, penataan pekerjaan, penyediaan sarana dan prasarana, sehingga dapat terus meningkatkan kualitas dan kemampuan pegawai.

Penelitian Lestari, Tripalupi dan Haris (2018) berjudul "Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Dengan Proteksi Banjar Dinas Untuk Mencegah Kredit Macet pada BUMDes Karya Sari Desa Pakisan Kecamatan Kubutambahan" menemukan hasil sistem pengendalian internal BUMDes Karya Sari sangat baik, karena BUMDes Karya Sari sudah memiliki lingkungan pengendalian yang baik, yaitu pimpinan BUMDes yang memiliki fungsi manajemen dapat memberikan contoh budaya organisasi yang baik dan berkomitmen terhadap kemampuan kerjanya. BUMDes Karya Sari sudah memiliki struktur organisasi, kewenangan penugasan dan pemisahan tugas yang jelas, serta kebijakan sumber daya manusia dalam perekrutan pegawai. Dokumen yang digunakan untuk pemberian kredit sudah cukup. Fakta membuktikan bahwa sistem pengendalian intern yang dilindungi oleh aparat banjar sangat efektif mencegah terjadinya kredit macet pada BUMDes Karya Sari, karena total kredit per Maret 2017 sebesar Rp. 322.805.000. Sedangkan kredit yang termasuk dalam kategori kredit macet menyumbang Rp172.788.000 dari total kredit, dengan total rasio efektif 87,39%. Di antara jumlah kredit macet, tidak ada kredit yang dianggap kredit macet, melainkan kredit kurang lancar dan kredit meragukan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.1.8. Kerangka Pemikiran

Menurut Suyatno dkk (2007:12) dalam pengertian ekonomi, kredit berarti menunda pembayaran kinerja saat ini dalam bentuk barang, uang atau jasa. Oleh karena itu, pihak pertama yang telah menorehkan prestasi dari pihak lain baik berupa barang, uang maupun jasa, dan selanjutnya akan menerima sumbangan dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Hery (2013:12) dengan sistem pengendalian internal yang ketat, semua aktivitas operasi diharapkan dapat memaksimalkan keuntungan. Jika pengendalian internal gagal berfungsi seperti yang diharapkan, mungkin terdapat inefisiensi, yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas.

Dengan adanya pengendalian internal yang efektif atas pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Impian Bersama Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan dapat meningkatkan kinerja Bumdes serta membantu keuangan para masyarakat berdasarkan potensi ekonomi di Desa ampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar. Pengendalian internal dalam penyaluran kredit sangat penting karena pengendalian ini dapat menjaga kekayaan dan kelangsungan Bumdes Impian Bersama menjadi lebih efektif dan efisien.

2.2. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan penelitian dan juga kerangka penelitian yang telah dijabarkan, maka hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Diduga sistem pengendalian internal atas pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Impian Bersama Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu belum sesuai dengan sistem pengendalian intern yang efektif."

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah kualitatif, dimana menurut Creswell (2010:4) penelitian kualitatif adalah suatu metode untuk menggali dan memahami makna individu atau kelompok tertentu yang bersumber dari masalah yang dikaji sesuai tema penelitian. Dalam konteks kualitatif secara alami melalui berbagai metode ilmiah yang secara utuh dideskripsikan dalam bahasa dan teks berdasarkan hasil wawancara.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Impian Bersama yang terletak di Desa Kampung Pulau, Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

3.3. Definisi Variabel Penelitian

Untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis pengendalian internal pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Impian Bersama Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu" ini maka penulis menggunakan alat analisis berupa unsur-unsur pengendalian internal dengan aspek pengukuran sebagai berikut :

1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terbagi dalam data primer dan data sekunder, yaitu:

1) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan dari responden melalui hasil wawancara tentang analisis pengendalian internal pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Impian Bersama Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu yang melibatkan direktur, ketua dan bendahara.

2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Impian Bersama Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri dari gambaran umum, laporan neraca, laporan laba rugi, foto dokumentasi, struktur organisasi dan buku harian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan data yang dipakai penulis secara umum terdiri beberapa tahapan, mulai dari wawancara dan dokumentasi penelitian. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1) Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:231) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dibangun makna dalam topik tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *wawancara testruktur* dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh sehingga peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

2) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:235) dokumentasi adalah bentuk bukti otentik ketika peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian yang sifatnya dapat menjadi bukti yang autentik agar hasil penelitian lebih ilmiah dan representatif. Dokumentasi dalam penelitian ini berbentuk foto-foto penelitian, laporan data-data yang seluruhnya telah dijabarkan di lampiran.

3.6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis pengendalian internal pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Impian Bersama Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, maka dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan membandingkan antara sistem yang telah diterapkan dalam perusahaan dengan sistem yang sebenarnya menurut teori yang dikemukakan oleh Mulyadi (2013:164).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Bumdes Impian Bersama

4.1.1. Sejarah Singkat Bumdes Impian Bersama

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Impian Bersama Kampung Pulau dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Usaha Impian Bersama di Desa Kampung Pulau selanjutnya juga didasarkan atas hasil musyawarah desa kampung pulau yang dilaksanakan pada tanggal 6 november 2015 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menggali potensi yang ada, perlu dibentuk suatu Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan Keputusan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Impian Bersama Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01/KEP/BUMDesa-IB/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Simpan Pinjam Al Rizki, terdapat 5 simpanan wajib dengan jenis:

a. Tabungan umum
b. Tabungan anak
c. Tabungan pendidikan
d. Tabungan Qurban
e. Deposito

Selanjutnya terdapat 7 jenis pinjaman dengan kriteria sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Perdagangan (D)
b. Pertanian (T)
c. Perkebunan (K)
d. Perikanan (I)
e. Peternakan (Tr)
f. Industri kecil (Ik)
g. Jasa (J)

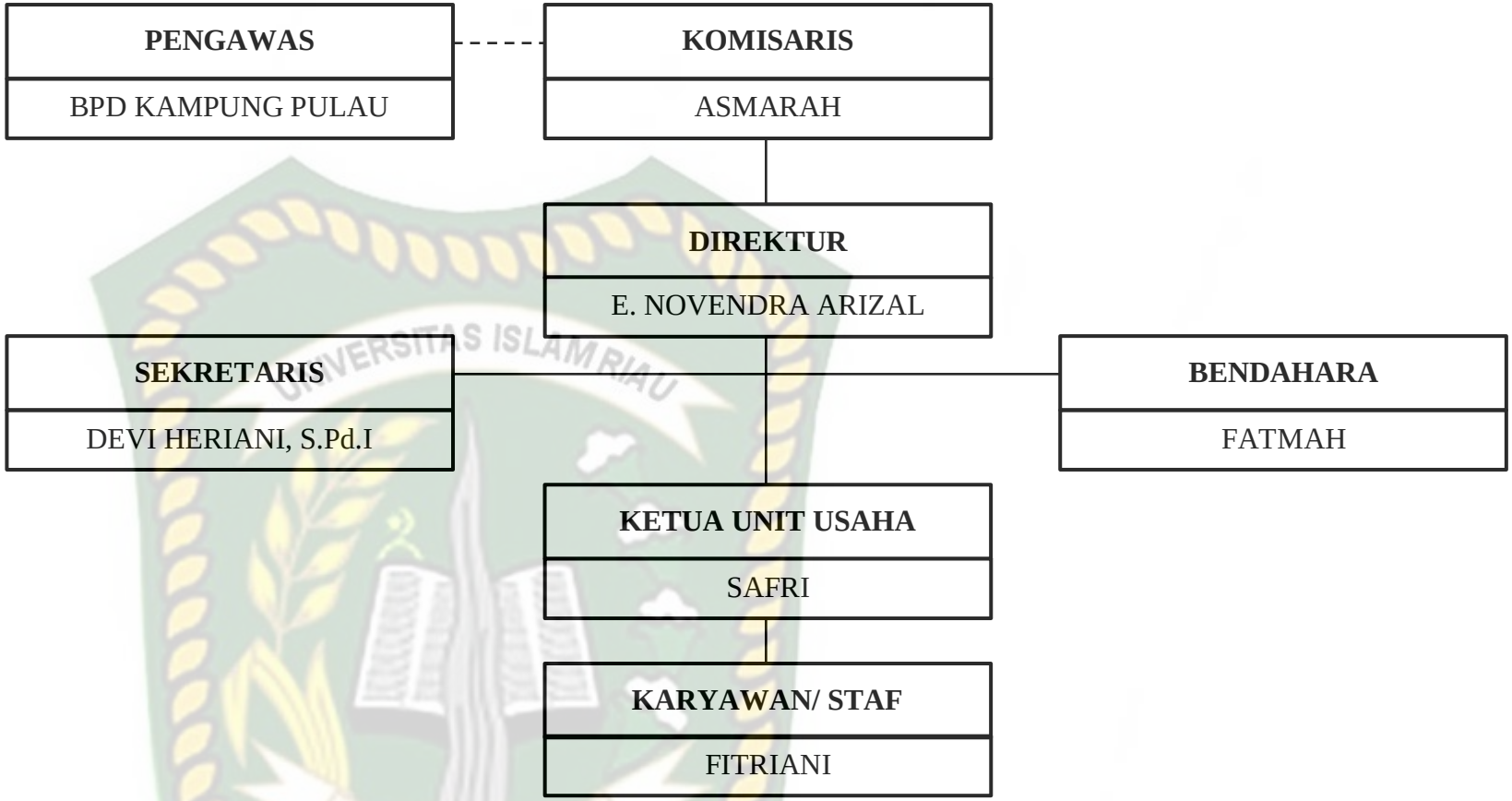
4.1.2. Struktur Organisasi Bumdes Impian Bersama

Dalam upaya menjalankan organisasinya, Bumdes Impian Bersama diawasi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kampung Pulau. Pimpinan tertinggi adalah Komisaris sebagai pembina, selanjutnya dikepalai oleh Direktur dengan dukungan sekretaris untuk bagian administrasi dan juga bendahara untuk mengatur keuangan. Bumdes Impian Bersama memiliki unit simpan pinjam, untuk itu dimanajemen oleh ketua unit usaha yang dibantu oleh karyawan sebagai staf analisis kredit.

Struktur organisasi menggambarkan kerangka dan susunan hubungan diantara fungsi, bagian atau posisi, juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan kegiatan organisasi berjalan secara efektif. Adapun struktur organisasi Bumdes Impian Bersama dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bumdes Impian Bersama Kampung Pulau



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan di Bumdes Impian Bersama

Adapun tugas pokok dan fungsi jabatan di Bumdes Impian Bersama dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) **Pengawas (BPD Kampung Pulau)**

Tugas:

a) Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa
b) Melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian desa lainnya.
c) Membina setiap unit usaha yang terdapat di bumdes.

Fungsi:

a) Mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja bumdes sekurang-kurangnya 1 tahun sekali
b) Rapat umum pengawas meliputi pemilihan dan pengangkatan pengurus bumdes.
c) Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari bumdes.
d) Mengusulkan rencana strategis usaha 6 tahunan yang dibuat oleh pelaksana operasional bumdes untuk disahkan kepala desa.
e) Melakukan pemeriksaan / audit terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan bumdes setiap 3 bulan sekali.
f) Membuat rekomendasi hasil pemeriksaan / audit.
g) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan operasional.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Komisaris

Tugas:

a) Bertindak sebagai pengawas, pemberian koordinasi sekaligus penasehat operasional bumdes.

b) Bertindak sebagai inisiator dalam peluang dan inovasi demi kemajuan bumdes.

c) Menjadi negosiator dalam musyawarah dengan pihak lain.

d) Menjadi tim penyusunan standar kinerja bumdes.

Fungsi:

a) Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direktur dalam menjalankan kegiatan pengelola usaha Desa.

b) Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan bumdes.

c) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan bumdes.

d) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan bumdes fisik memantau perkembangan bumdes.

e) Melaksanakan pemeriksaan atau audit terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan bumdes setiap 3 bulan sekali.

f) Membuat rekomendasi hasil pemeriksaan atau audit.

g) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam musyawarah desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3) Direktur

Tugas:

a) Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional bumdes.

b) Membina pegawai pelaksanaan operasional.

c) Mengurus dan mengelola kekayaan bumdes.

Fungsi:

a) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan bumdes.

b) Menyusun rencana strategis usaha 6 tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa melalui usul badan pengawas.

c) Menyusun dan menyampaikan rencana usaha dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis usaha kepada kepala desa melalui badan pengawas.

d) Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan bumdes minimal tiga bulan sekali melalui musyawarah desa.

4) Ketua unit

Tugas:

a) Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat.

b) Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c) Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa.

d) Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Fungsi:

a) Mengelola unit usaha yang mencakup SDM, rencana kerja dan operasional.

b) Menyusun rencana kerja perbulan dan pertahun.

c) Menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada direktur mengenai keuangan unit usaha dan kegiatan unit usaha paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

5) Sekretaris

Tugas:

a) Merencanakan pengelolaan data serta informasi bumdes berbasis perencanaan.

b) Melaksanakan kegiatan teknis berbasis mitra serta kerjasama dengan lembaga lain.

Fungsi:

a) Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran.

b) Membantu direktur dalam penyusunan rencana strategis usaha 6 tahunan yang disahkan oleh kepala desa melalui usul badan pengawas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c) Membantu direktur dalam penyusunan rencana usaha dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis usaha kepada kepala desa melalui badan pengawas.

d) Mengusahakan kelengkapan organisasi

e) Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai.

f) Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan badan pengawas.

6) Bendahara

Tugas:

a) Bertanggungjawab dalam pengelolaan administrasi keuangan berbasis perencanaan.

b) Mengelola setiap aset dan inventarisasi bumdes.

c) Mendayagunakan aset dan perbendaharaan bumdes.

Fungsi:

a) Menerima, membayarkan dan menata usaha keuangan bumdes.

b) Melaksanakan pembukuan keuangan

c) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja bumdes.

d) Menyusun laporan keuangan

e) Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan bumdes

f) Dalam hal pengeluaran keuangan harus di atas pengetahuan dan persetujuan direktur bumdes.

g) Membantu direktur dalam penyusunan rencana strategis usaha 6 tahunan yang disahkan oleh kepala desa melalui usul badan pengawas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

h) Membantu direktur dalam penyusunan rencana usaha dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis usaha kepada kepala desa melalui badan pengawas.

7) Karyawan

Tugas:

a) Melaksanakan tugas sesuai bidang / unit usaha masing-masing.

b) Mematuhi seluruh kewajiban dan larangan.

c) Mendahulukan kepentingan Bumdes diatas kepentingan lainnya.

Fungsi:

a) Bertindak selaku Staf Analisis Kredit untuk menganalisis tingkat potensi kemampuan calon nasabah

b) Membantu calon nasabah dalam mengurus simpanan maupun pinjaman

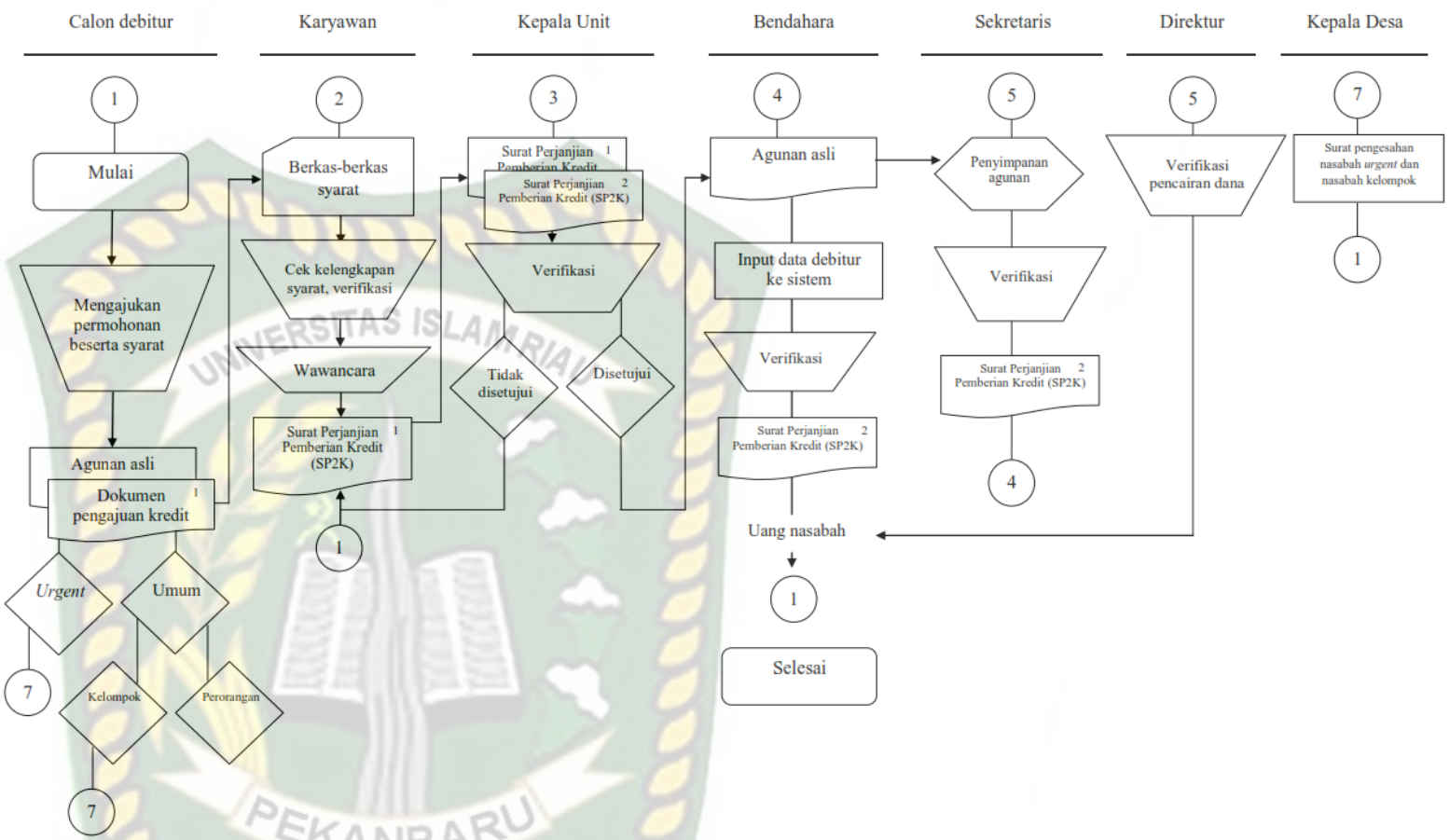
c) Melakukan penagihan pada nasabah yang menunggak

4.2. Prosedur Kredit Bumdes Impian Bersama

Adapun prosedur pemberian kredit pada Bumdes Impian Bersama dapat digambarkan sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar 4.2
Flow Chart Pemberian Kredit Bumdes Impian Bersama Kampung Pulau



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tahap pertama, persyaratan peminjam adalah warga masyarakat Desa Kampung Pulau yang telah berdomisili minimal 5 tahun di Desa Kampung Pulau. Warga merupakan masyarakat Desa Kampung Pulau yang mempunyai usaha lebih dari 5 tahun. Pinjaman dapat diajukan secara perseorangan maupun kelompok. Usia anggota yang boleh mengajukan minimal 20 tahun dan maksimal 60 tahun. Calon peminjam harus mengisi formulir pengantar permohonan kredit, usulan rencana usaha pemanfaat (RUP), formulir surat kuasa, surat pernyataan kesediaan agunan, surat persetujuan saudara kandung, surat serah terima anggunan.

Tahap kedua, calon peminjam melampirkan fotokopi KTP atau SIM, fotocopy KK, dan fotocopy anggunan. Selanjutnya membayar biaya administrasi sebesar 0,7% dari jumlah pinjaman. Mempunyai tabungan minimal 5% dari jumlah pinjaman. Bagi peminjam lanjutan ketentuannya jika mempunyai catatan tanpa tunggakan dapat mengajukan jumlah yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya. Jika mempunyai catatan tunggakan diatas 6 kali angsuran maka tidak diperkenankan melakukan pinjaman lagi berikutnya.

Tahap ketiga, calon peminjam membuat proposal sesuai dengan contoh format yang telah disesuaikan. Menyiapkan agunan asli/ jaminan harta untuk pinjaman lebih dari Rp.1.000.000,- dan jika jumlah pinjaman kurang dari Rp.1.000.000,- maka diharuskan perkelompok dengan membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Tanggung Renteng yang dibuat diatas kertas bermaterai dengan menyebutkan sumber dana yang akan digunakan. Setiap kelompok memiliki kepengurusan yang jelas dengan anggota minimal 10 orang termasuk pengurus.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tahap keempat, calon peminjam harus dinilai layak oleh Staff Analisis Kredit (Karyawan) baik secara administrasi dan usaha serta bersedia melayani Staff Analisis Kredit untuk menilai kelayakan usaha.

Tahap kelima, calon peminjam menyerahkan agunan yang menjadi tanggungjawab pengelola unit Bumdes SP. Agunan juga dapat berbentuk barang bergerak yang dapat diterima adalah berupa Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Agunan haruslah dokumen asli dan keabsahannya tidak diragukan.

Tahap keenam, Staff Analisis Kredit akan memverifikasi dan dituangkan dalam berita acara melalui musyawarah khusus bersama Ketua Unit dan Direktur, untuk disetujui didanai kegiatan yang diusulkan oleh anggota Unit Bumdes tersebut. Besarnya nilai pinjaman barang bergerak dalam maksimal 70% dari nilai agunan yang dihitung pada akhir peminjam jatuh tempo. Besarnya nilai pinjaman barang tidak bergerak adalah maksimal 80% dari nilai agunan. Adapun besar bunga pinjaman yaitu sebesar 1,5% per bulan flat. Jangka waktu angsuran minimal 12 bulan dan maksimal 18 bulan. Jadwal pembayaran angsuran ditambah bunga yang diterima pengelola adalah dimulai pada tanggal 1 sampai tanggal 15 setiap bulannya.

Tahap ketujuh, calon peminjam menunggu hasil musyawarah desa tentang perguliran dana untuk periode tertentu. Setiap perguliran baru dilakukan setelah dana usaha desa terserap semua dan pada saat dana awal tidak mencukupi lagi terhadap besarnya jumlah usulan pinjaman masyarakat. Peminjaman reguler menganut sistem waiting list atau antrian. Peminjam khusus *urgent* atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

exceptional tidak menganut sistem antrian dengan syarat harus melampirkan data-data pendukung pinjaman dan harus diketahui kepala desa. Bagi peminjam yang akan melunasi hutangnya sebelum selesai batas waktu kredit/ angsurannya maka wajib melunasi sisa hutang (pokok ditambah jasa) dan bisa mengajukan pinjaman berikutnya.

4.3. Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Impian Bersama Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

4.3.1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas

Struktur organisasi ialah suatu bagian kerangka yang didalamnya membagi koordinasi, tanggung jawab, tugas dan wewenang fungsional yang biasanya terdiri dari unit atau divisi yang dibentuk sedemikian rupa untuk melaksanakan aktivitas operasional organisasi. Adapun pembagian tanggungjawab secara teknis dan fungsional harus memiliki beberapa prinsip, yaitu:

1) Harus dilakukan pemisahan tiap-tiap unit operasi serta pemisahan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasional ialah fungsi yang berwenang melaksanakan suatu kegiatan yang berbeda-beda dibandingkan fungsi lainnya. Setiap aktivitas operasional organisasi harus memerlukan otorisasi mutlak dari kepala atau pimpinan yang berwenang atas kegiatan dan membawahinya. Fungsi penyimpanan ialah fungsi yang berwenang melakukan pencatatan berbagai peristiwa-peristiwa keuangan yang terjadi dalam organisasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Untuk menjaga stabilitas serta kredibilitas dari masing-masing fungsi hendaknya tidak diperbolehkan untuk memegang tanggungjawab penuh atas suatu transaksi dari awal hingga akhir. Sehingga pembagian tugas dalam masing-masing fungsi dapat menjaga keutuhan operasional organisasi.

Masih terdapat ketidaksesuaian pengendalian intern dengan teori yang dikemukakan Mulyadi (2013:164) yang menyebutkan struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Pada unsur ini, Bumdes Impian Bersama Kampung Pulau belum sesuai karena struktur organisasi yang ada belum memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi yang disebutkan terdiri dari ketua unit, bendahara merangkap kasir, sekretaris merangkap tata usaha dan karyawan/ staf merangkap staf analisis kredit. Kenyataannya dalam SOP yang tertera, tugas dan tanggungjawab yang dijabarkan cenderung terlalu ringkas dan kurang rinci membahas tugas dan tanggungjawab masing-masing jabatan dalam Bumdes.

Hasil observasi pada SOP pengelola bumdes impian bersama, hanya menunjukkan tugas karyawan sebagai berikut:

a) Melaksanakan tugas sesuai bidang / unit usaha masing-masing.
b) Mematuhi seluruh kewajiban dan larangan.
c) Mendahulukan kepentingan Bumdes diatas kepentingan lainnya.

Padahal sesuai kenyataan di lapangan, tugas karyawan ini adalah:

a) Bertindak selaku Staf Analisis Kredit untuk menganalisis tingkat potensi kemampuan calon nasabah.
b) Membantu calon nasabah dalam mengurus simpanan maupun pinjaman.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c) Melakukan penagihan pada nasabah yang menunggak.

Dalam proses pemberian kredit, memang sudah memiliki sistem verifikasi bertahap yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) yang masing-masing jabatan harus menandatanganinya, meskipun terdapat otorisasi mutlak dari kepala atau pimpinan yang berwenang atas kegiatan dan membawahinya yaitu ketua unit dan direktur.

Terdapat peminjam khusus *urgent* atau *exceptional* yang seharusnya sesuai SOP tidak perlu antri dengan meminta pengesahan terlebih dahulu dari Kepala Desa, kenyataan yang terjadi terdapat indikasi petugas Bumdes mempermudah atau meloloskan peminjam khusus tersebut tanpa perlu meminta persetujuan Desa dengan mengharapkan imbalan uang fee setelah pencairan dana peminjam.

4.3.2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya

Untuk menjaga stabilitas aktivitas suatu organisasi, maka harus melalui izin dan persetujuan dari pimpinan utama selaku pemegang otorisasi organisasi untuk setiap transaksi yang terjadi. Organisasi wajib memiliki sistem yang efektif untuk mengelola distribusi otorisasi atas setiap transaksi yang terjadi. Setiap penggunaan dan pengisian formulir harus terus diawasi agar menjaga otorisasi sistem dan wewenang dalam transaksi.

Formulir menjadi dokumen penting yang digunakan sebagai kunci untuk pencatatan transaksi, prosedur pencatatan yang baik dapat menjamin ketelitian dan memiliki keandalan tinggi dari data yang direkam dalam catatan akuntansi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hal ini dapat menjamin terciptanya dokumen pembukuan yang kredibel dalam proses akuntansi. Selain itu, apabila prosedur pencatatan dilakukan secara rinci akan menghasilkan suatu informasi yang valid, akurat dan reliabel dalam menghitung kekayaan, hutang, pendapatan, dan beban pada suatu organisasi sesuai teori Mulyadi (2013:164).

Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya belum sesuai dengan teori Mulyadi (2013:164) karena prosedur penyimpanan agunan nasabah juga hanya menggunakan lemari arsip yang dibuat tanpa bernomor, sehingga untuk proses pengarsipan masih sangat sederhana. Selain itu, terdapat peminjam macet yang menggunakan KTP Kampung Pulau, setelah pencarian dana sering berada di luar Kota dan jarang pulang kembali ke Kampung Pulau dengan alasan bekerja. Akibatnya proses angsuran menjadi macet tanpa ada tindakan lebih lanjut terkait hal tersebut karena sistem kerabat penjamin saat pengisian formulir kurang efektif dalam mengontrol angsuran sipeminjam.

Bumdes Impian Bersama tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik baik persemester (6 bulan sekali) maupun setiap setahun sekali. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan monev ini baru dilakukan di tahun 2020, sedangkan oleh Kepala Unit sebelumnya belum pernah dilaksanakan, hal ini tentu beresiko pada evaluasi kinerja Bumdes Impian Bersama yang kinerjanya ditinjau dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan observasi formulir verifikasi usulan yang diisi oleh karyawan yang bertugas sebagai staf analisis kredit memuat 9 poin yang dikemukakan, akan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tetapi hanya 3 poin saja yang diisi (*checklist*). Selanjutnya, tidak ada tanda tangan pada lembar surat kuasa agunan dari pemberi kuasa (calon peminjam) kepada penerima kuasa (ketua unit) karena tidak adanya verifikasi dari saksi. Hal ini tentu dapat menimbulkan risiko atas minimnya transparansi perlindungan terhadap aset atau agunan yang dijaminkan oleh peminjam.

4.3.3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi

Untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap unit-unit yang ada pada bagan organisasi, harus dilakukan praktik yang sehat diantaranya pembagian fungsional tanggungjawab serta wewenang dan prosedur pencatatan yang baik. Jika hal ini tidak dilakasanakan, maka tidak akan tercipta prosedural yang menjamin praktik yang berjalan dalam organisasi sehat. Beberapa cara yang sering digunakan orgasniasi untuk menciptakan praktik yang sehat antara lain:

1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Formulir merupakan alat untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi sehingga pengendalian pemakaiannya dengan menggunakan nomor urut tecetak, akan dapat menetapkan pertanggungjawaban terlaksananya transaksi.
2) Pemeriksaan mendadak (*suprised audit*). Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. Jika dalam suatu organisasi dilaksanakan pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan-kegiatan pokoknya,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hal ini akan mendorong karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Karena setiap transaksi yang dilaksanakan dengan campur tangan pihak lain, akan mengakibatkan terjadinya *internal check* terhadap pelaksanaan tugas setiap unit organisasi yang terkait, sehingga mendorong setiap unit organisasi melaksanakan praktik yang sehat dalam pelaksaan tugasnya.
4) Perputaran jabatan (*job rotation*). Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan diantara mereka dapat dihindari.
5) Keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan sementara oleh pejabat lain, sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam departemen yang bersangkutan, diharapkan dapat diungkapkan oleh pejabat yang menggantikan untuk sementara tersebut.
6) Secara periodik diadakan percocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya, secara periodik harus diadakan percocokan atau rekonsiliasi antara aset secara fisik dengan catatan akuntansi atas aset tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur pegendalian intern yang lain.

Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi belum sesuai dengan teori Mulyadi (2013:164) karena dari hasil observasi terhadap proposal pengajuan kredit milik salah satu peminjam yang sudah disetujui menunjukkan Ketua unit Bumdes Impian Bersama tidak membubuhkan tanda tangan pada surat kuasa, surat persetujuan saudara kandung, dan surat serah terima agunan. Hal ini tentu kurang dapat menjamin stabilitas serta kredibilitas dari masing-masing fungsi hendaknya karena setiap bukti verifikasi memegang tanggungjawab penuh atas suatu transaksi dari awal hingga akhir sehingga pembagian tugas dalam masing-masing fungsi dapat menjaga keutuhan operasional organisasi.

Bumdes Impian Bersama masih mengandalkan SOP pemberian kredit lama yang terbukti memiliki celah pelanggaran dan belum menyusun strategi penilaian risiko yang baru. Pada SOP ini juga tidak memuat sanksi atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah. Terdapat peminjam yang menggunakan data keluarga atau kerabatnya sendiri untuk melakukan pinjaman di Bumdes Impian Bersama, meskipun jaminan yang dimiliki peminjam tidak atas nama dirinya tetapi mereka beralasan jaminan (BPKB, SKGR, SHM, dan sebagainya) yang mereka miliki belum dilakukan pengalihan nama.

4.3.4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik sehat,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

semuanya tergantung pada manusia yang melaksanakannya. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaanya dengan efisien dan efektif. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya berbagai cara berikut ini dapat ditempuh:

1) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaanya. Untuk mamperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan dipikulnya, manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang akan menduduki jabatan tersebut.
2) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya belum sesuai dengan teori Mulyadi (2013:164) karena sekretaris berasal dari latar belakang pendidikan sarjana keguruan. Penerapan komitmen Bumdes Impian Bersama Kampung Pulau terhadap kompetensi karyawan yang belum optimal dimana masih banyak karyawan yang tidak sesuai antara kapabilitas dengan jabatan yang diemban sehingga kompetensi dapat berbanding terbalik dengan kinerja yang ditunjukkan.

Komisaris, Direktur, Ketua Unit, Karyawan dan Bendahara memiliki latar belakang pendidikan SLTA. Sementara itu, sekretaris berasal dari latar belakang pendidikan sarjana keguruan. Hal ini berarti tidak satupun pengurus Bumdes Impian Bersama yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, hal ini tentu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dapat menjadi salah satu penyebab belum efektifnya pencatatan keuangan yang dilakukan, serta beresiko dapat menurunkan kualitas pencatatan laporan keuangan itu sendiri.

Berdasarkan observasi pada SOP pengelola Bumdes Impian Bersama, disebutkan pada angka VI Perekrutan dan perjanjian kerja yang menyebutkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan pengurus Bumdes Impian Bersama, apabila dipandang perlu harus diadakan pendaftaran dan seleksi, peserta yang diperbolehkan mendaftar dari desa setempat dengan bukti memiliki KTP dan berdomisili di desa.

Dalam SOP tersebut, tidak disebutkan sama sekali kriteria latar belakang pendidikan yang dibutuhkan, sehingga hal ini tentu harus menjadi perbaikan agar bumdes impian bersama di masa mendatang dapat memiliki pengurus yang kompeten sesuai dengan bidang dan pendidikannya masing-masing jabatan.

4.4. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Dalam praktiknya, Bumdes Impian Bersama memiliki masalah terkait kredit bermasalah. Kredit bermasalah ini terjadi, saat pemanfaat tidak menggunakan dana dengan maksimal sesuai dengan pengajuan yang diberikan. Selama 3 tahun terakhir saja, jumlah tunggakan terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, artinya kredit bermasalah merupakan salah satu hal yang serius karena dapat menyebabkan operasional penyaluran dana untuk pemanfaat selanjutnya terhambat. Berikut data kredit bermasalah selama 3 tahun terakhir pada tabel di bawah ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 4.1
Kredit Bermasalah Pada Unit Ekonomi Desa (UED) Bumdes Impian Bersama Selama Tahun 2017 s/d 2019

Kolektibilitas	Tahun 2017	%	Tahun 2018	%	Tahun 2019	%
Lancar	Rp.449.156.000	78%	Rp.405.673.000	70%	Rp.436.708.000	72%
Dalam perhatian khusus	Rp.52.697.000	9%	Rp.62.293.000	11%	Rp.68.041.000	11%
Kurang lancar	Rp.8.272.000	1%	Rp.40.072.000	7%	Rp.18.496.000	3%
Diragukan	Rp.12.456.000	2%	Rp.11.200.000	2%	Rp.10.305.000	2%
Macet	Rp.54.525.000	9%	Rp.57.053.000	10%	Rp.69.830.000	12%
Total	Rp.577.106.000	100%	Rp.576.291.000	100%	Rp.603.380.000	100%

Sumber: Bumdes Impian Bersama, (data diolah)

Dari tabel di atas memperlihatkan kredit bermasalah khususnya pada kategori dalam perhatian khusus tahun 2017 sebesar Rp.52.697.000 (9%) meningkat di tahun 2018 hingga 2019 menjadi Rp.68.041.000 (11%). Kredit kurang lancar dari tahun 2017 sebesar Rp.8.272.000 (1%) meningkat ditahun 2018 menjadi Rp.40.072.000 (7%) namun kembali menurun di tahun 2019 menjadi Rp.18.496.000 (3%). Kredit diragukan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dan tetap di 2%. Sementara itu, Kredit macet dari tahun 2017 sebesar Rp.54.525.000 (9%), meningkat di tahun 2018 menjadi Rp.57.053.000 (10%) dan kembali meningkat di tahun 2019 menjadi Rp.69.830.000 (12%).

Sejauh ini upaya yang dilakukan pihak Bumdes Impian Bersama terhadap para pemanfaat yang menunggak adalah hanya mengunjungi rumah nasabah secara langsung terkait permasalahan tunggakan dan melakukan negosiasi terkait angsuran pembayaran dengan nominal berapapun uang yang dimiliki nasabah tanpa harus membayar penuh jumlah tunggakannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga silaturahmi karena proses penagihan dilakukan secara kekeluargaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tidak ada peringatan tertulis yang diberikan kepada nasabah macet ini, dan penyitaan dilakukan dalam jangka waktu 3 sampai 4 kali tunggakan.

Proses penyitaan juga dilakukan secara musyawarah terlebih dahulu, adapun agunan tersebut beserta unit yang dimiliki akan dijual sebagai upaya penyelesaian tunggakan. Upaya penyelesaian kredit macet dan bermasalah ini dilakukan untuk mengembalikan seluruh piutang pinjaman terhadap resiko kerugian yang dialami oleh Bumdes Impian Bersama.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan Bumdes Impian Bersama untuk menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah ini diantaranya adalah:

1) Melakukan kunjungan ke rumah nasabah atau pemanfaat terkait kendala yang menjadi penyebab angsurannya macet, dan melakukan negosiasi terkait angsuran pembayaran dengan nominal berapapun uang yang dimiliki nasabah tanpa harus membayar penuh jumlah tunggakannya.
2) Melakukan musyawarah dengan nasabah terkait keringanan angsuran untuk membayar angsuran pokok saja tanpa perhitungan denda dan bunga.
3) Memberikan surat edaran peringatan tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Bumdes Impian Bersama.
4) Berupaya semaksimal mungkin melakukan mediasi dengan nama penjamin tanpa harus menyita agunan, namun jika nasabah tersebut tidak kooperatif maka dapat dilakukan penyitaan/ lelang agunan atas aset yang digunakan sebagai jaminan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5) Memperbaharui SOP Pemberian kredit dengan mencantumkan perihal sanksi dan pelanggaran bagi keterlambatan angsuran oleh nasabah/ pemanfaat, dan lebih mensosialisasikan kepada para calon nasabah baru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Sistem pengendalian internal atas pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Impian Bersama Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu belum sesuai dengan sistem pengendalian intern yang efektif. Hal ini disebabkan karena;

1) Prosedur pemberian kredit untuk persyaratan peminjam adalah warga masyarakat Desa Kampung Pulau yang telah berdomisili minimal 5 tahun di Desa Kampung Pulau. Warga merupakan masyarakat Desa Kampung Pulau yang mempunyai usaha lebih dari 5 tahun. Pinjaman dapat diajukan secara perseorangan maupun kelompok. Usia anggota yang boleh mengajukan minimal 20 tahun dan maksimal 60 tahun. Calon peminjam harus mengisi formulir pengantar permohonan kredit, usulan rencana usaha pemanfaat (RUP), formulir surat kuasa, surat pernyataan kesediaan agunan, surat persetujuan saudara kandung, surat serah terima anggunan.
2) Struktur organisasi yang ada belum memisahkan tanggung jawab fungsional setiap jabatan secara tegas. Kenyataannya dalam SOP yang tertera, tugas dan tanggungjawab yang dijabarkan cenderung terlalu ringkas dan kurang rinci membahas tugas dan tanggungjawab masing-masing jabatan pengurus.
3) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan belum memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Penyimpanan agunan nasabah hanya menggunakan lemari arsip yang dibuat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tanpa bernomor, sehingga untuk proses pengarsipan masih sangat sederhana. Minimnya kriteria analisis kredit calon peminjam, tidak adanya tanda tangan pada lembar surat kuasa agunan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa dan tidak adanya verifikasi dari saksi. Hal ini tentu dapat menimbulkan risiko atas minimnya transparansi perlindungan terhadap aset atau agunan yang dijaminkan oleh peminjam.

4) Praktik yang kurang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Bumdes Impian Bersama masih mengandalkan SOP pemberian kredit lama yang terbukti memiliki celah pelanggaran dan belum menyusun strategi penilaian risiko yang baru, terbukti dari adanya peminjam yang menggunakan data keluarga atau kerabatnya sendiri untuk melakukan pinjaman. Tidak adanya verifikasi status usaha oleh karyawan staf analisis kredit, meskipun sudah tertuang sebagai salah satu syarat utama bagi para calon peminjam dana.

5) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya belum efektif, karena tidak satupun pengurus Bumdes Impian Bersama yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, hal ini tentu dapat menjadi salah satu penyebab belum efektifnya pencatatan keuangan yang dilakukan, serta dapat menurunkan efisiensi dan efektifitas dari kualitas laporan keuangan itu sendiri.

5.2. Saran

Dari kesimpulan dan pembahasan penelitian ini maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1) Perlu disusun struktur organisasi lebih jelas dalam memisahkan tanggung jawab fungsional setiap jabatan secara tegas misalnya sekretaris yang merangkap sebagai tata usaha, bendahara yang merangkap sebagai kasir, dan karyawan yang merangkap sebagai staf analisis kredit.
2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan harus memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Perlu disusun ulang penggunaan lemari arsip yang dibuat bernomor-nomor, sehingga untuk proses pengarsipan mudah diakses. Diperlukan ketegasan atas setiap form berisikan tanda tangan pada setiap lembar surat khususnya pencatatan keuangan untuk menciptakan transparansi perlindungan terhadap aset atau agunan yang dijaminkan oleh peminjam valid dan kredibel.
3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi perlu ditingkatkan dengan mulai menyusun SOP pemberian kredit terbaru yang lebih teknis untuk mengatasi celah pelanggaran penggunaan dana. Staf analisis kredit perlu mengutamakan verifikasi status usaha bagi para calon peminjam dana karena hal ini berkaitan langsung dengan kemampuannya dalam membayar angsuran kredit.
4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya perlu lebih dioptimalkan, dengan melakukan rekrutmen terhadap calon karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pencatatan laporan keuangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J.W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hall, James, A. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 4.* Jakarta: Salemba Empat.

Hartadi, Bambang. 2013. *Sistem Pengendalian Dalam Hubungan dengan Manajemen dan Audit Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE.

Hery. 2013. *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: Kencana.

Jusup, Al Haryono. 2014. *Dasar-Dasar Akuntansi Edisi 7*. Yogyakarta: STIE YKPN.

Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Kumaat, Valery G. 2011. *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.

Lestari, Luh., Tripalupi, Lulup Endah., dan Haris, Iyus Akhmad. 2018. *Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Dengan Proteksi Banjar Dinas Untuk Mencegah Kredit Macet pada BUMDes Karya Sari Desa Pakisan Kecamatan Kubutambahan*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, Volume 10, Nomor 1, Tahun 2018.

Mulyadi, Deddy. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyono, Pudjo. 2011. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial edisi 4.*Yogyakarta: BPFE.

Munawir, S. 2014. *Auditing edisi 1*. Yogyakarta: Liberty.

Nilawati. 2016. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng*. Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE), Volume 7, Nomor 2, Tahun 2016.

Niswonger Warren Reeve Fees. 2010. *Prinsip-Prinsip Akuntansi edisi 19*. Jakarta: Erlangga.

Pirdaus. 2016. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat*. (Skripsi) Tidak diterbitkan. Universitas Pasir Pengaraian.

Romney, Marshall B., dan Steinbart, Paul John. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi edisi terjemahan*. Jakarta: Salemba Humanika.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukrisno, Agoes. 2012. *Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Susanto, Azhar. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.

Suyatno dkk. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi 4*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Usman, Rachmadi. 2013. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Wakhyudi. 2018. *Soft Controls Aspek Humanisme Dalam Sistem Pengendalian Intern*. Yogyakarta: IKAPI.

Widjadjanto, Nugroho. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :